



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

Komplek Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat I Lantai 2

Email: Kesbangnatuna@yahoo.com

RANAI – NATUNA

Kode pos : 29711

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**DAERAH KABUPATEN NATUNA**  
**NOMOR 09 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan, Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna ( Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 66 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 66).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN NATUNA.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna, dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai  
Pada tanggal 29 Januari 2018

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,



**Drs. MUHTAR ACHMAD, M. Eng**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19740225 199302 1 001

## INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN NATUNA

Kabupaten : Natuna

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, politik serta melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantu yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Fungsi : 1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional dan politik;  
 2. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan serta fasilitasi bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;  
 3. Merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan kewaspadaan nasional, penanganan konflik, fasilitas bagi organisasi politik dan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
 4. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesiagaan penanggulangan bencana daerah;  
 5. Pelaksanaan kebijakan kesiagaan penanggulangan bencana daerah;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama SKPD	Alasan Penggunaan	Sumber Data	Penjelasan *)
1	Meningkatnya jumlah partisipasi pemilih pada pemilu;	1. Tingkat partisipasi pemilih	Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih pada pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Natuna	Bidang Politik, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Natuna	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang datang ke TPS}}{\text{Jumlah DPT}} \times 100$
2	Menurunnya angka kriminalitas	2. Angka kriminalitas	Untuk mengetahui kasus angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Natuna	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Polres Natuna	Dihitung dari angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Natuna selama 1 Tahun
3	Meningkatkan kualitas Ormas/LSM/OKP	3 Jumlah Organisasi masyarakat/ LSM yang aktif	Untuk mengetahui Organisasi masyarakat/LSM yang aktif di Kabupaten Natuna	Bidang Pengembangan budaya politik	Dihitung dari jumlah organisasi masyarakat/LSM yang aktif
4	Menurunnya konflik Sosial	4 Jumlah konflik Sosial	Untuk mengetahui jumlah konflik Sosial yang terjadi di Natuna	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemaasyarakatan serta Kewaspadaan Nasional dan Penanggulangan Bencana	Dihitung dari jumlah konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Natuna

Ranai, 29 Januari 2018  
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK DAERAH  
 KABUPATEN NATUNA,



**Drs. MUHTAR ACHMAD, M. Eng**  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19740225 199302 1001

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : SEKRETARIS BADAN
2. Tugas : Mengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan
3. Fungsi : 1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Bakesbangpol  
 2. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Bakesbangpol  
 3. Pembinaan dan pemberian administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Bakesbangpol; dan  
 4. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULA PERHITUNGAN / PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Tercapainya pelaksanaan administrasi perkantoran	1. Persentase surat dinas yang teradministrasi sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah surat dinas yang di proses sesuai SOP}}{\text{Jumlah surat dinas}} \times 100$	- Data register surat
2.	Tercapainya ketersediaan sarana dan prasarana	2. Persentase kendaraan dinas yang layak pakai  3. Persentase pralatan dan perlengkapan aparatur yang tersedia sesuai kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah kendaraan dinas layak pakai}}{\text{Jumlah kendaraan dinas}} \times 100$  $\frac{\text{Jumlah pralatan perlengkapan kantor yang tersedia}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan}} \times 100$	- Data kendaraan dinas - Data peralatan dan perlengkapan kantor
3.	Tercapainya laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu	4. Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan}}{\text{Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun}} \times 100$	- Data laporan kinerja

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan administrasi meliputi pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, kehumasan, keputakaan dan kearsipan dalam rangka menunjang tugas Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3. Fungsi : Melakukan koordinasi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULA PERHITUNGAN / PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Terpenuhinya analisa jenis surat masuk	Persentase jenis surat	$\frac{\text{Jumlah jenis surat ( SK )}}{\text{Jumlah keseluruhan surat masuk dan keluar}} \times 100$	- Agenda surat
2.	Terpenuhinya penyajian data kepegawaian	Persentase penyempurnaan data base administrasi kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah PNS yang naik pangkat ( 0 )}}{\text{Jumlah keseluruhan surat masuk dan keluar}} \times 100$	- D U K ( Daftar Urut Kepangkatan )
3.	Terpenuhinya bahan laporan pencapaian Sasaran Kerja Pegawai	Persentase laporan pencapaian Sasaran Kerja Pegawai	$\frac{\text{Jumlah laporan pencapaian SKP ( 26 )}}{\text{Jumlah seluruh pegawai Kesbangpol ( 26 )}} \times 100$	- SKP PNS

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
2. Tugas : Melakukan administrasi kepegawaian di lingkungan SKPD
3. Fungsi :
  1. Membuat usulan kenaikan gaji berkala
  2. Menghimpun dan membuat usulan kenaikan pangkat
  3. Membuat SKP
  4. Meregister dan mengarsip buku register kepegawaian
  5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
  6. Mencatat jumlah arsip surat-surat dinas
  7. Menghimpun arsip-arsip surat kepegawaian

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULA PERHITUNGAN / PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya tertib administrasi data kepegawaian dan tertib administrasi surat menyurat	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di sekretariat	- Pengadministrasi Kepegawaian
		Jumlah arsip kenaikan pangkat	Jumlah pegawai yang pangkat nya naik	
		Jumlah SKP	Jumlah SKP semua karyawan	
		Jumlah arsip buku register kepegawaian	Jumlah buku register kepegawaian yang di arsipkan	
		Jumlah rekap absensi pegawai	Jumlah absensi pegawai yang di rekap	
		Jumlah arsip surat-surat kepegawaian	Jumlah surat-surat kepegawaian yang di arsipkan	
		Jumlah arsip kenaikan gaji berkala	Jumlah kenaikan gaji berkala pegawai yang di arsipkan	
		Jumlah pencatatan arsip surat-surat dinas	Jumlah surat-surta dinas yang di arsipkan	

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : PRANATA KEARSIPAN
2. Tugas : Jabatan ini merupakan jabatan yang menerima, memeriksa dan mempelajari karakteristik, spesifikasi dan hal-hal lain yang terkait dengan arsip-arsip dan memelihara arsip-arsip sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
3. Fungsi : Menyimpan dan mengendalikan arsip

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULA PERHITUNGAN / PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Tersedianya bahan laporan	Jenis arsip yang diterima, dicatat, disimpan dan dikendalikan	Jenis arsip yang diterima, dicatat, disimpan dan dikendalikan	

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : PENGEMUDI
2. Tugas : a. Menjemput pimpinan dari rumah untuk di antar ke tempat  
b. Mengantar pimpinan apabila mendapat undangan  
c. Merawat kendaraan dinas yang akan di gunakan  
d. Membersihkan kendaraan dinas dengan mencuci atau membersihkan debu yang ada  
e. Mengecek kelayakan kendaraan pimpinan
3. Fungsi :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULA PERHITUNGAN / PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Melaksanakan pekerjaan pelayanan sebgai driver pimpinan	Jumlah pekerjaan pelayanan sebagai driver pimpinan bakesbangpol	240 hari	

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : SEKRETARIS KEPALA BADAN
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan administrasi meliputi pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, kehumasan, keputakaan dan kearsipan dalam rangka menunjang tugas Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4. Fungsi : Melakukan koordinasi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMASI PERHITUNGAN / PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terpenuhinya analisa jenis surat masuk	Persentase jenis surat	$\frac{\text{Jumlah jenis surat ( SK )}}{\text{Jumlah keseluruhan surat masuk dan keluar}} \times 100$	- Agenda surat
2.	Terpenuhinya penyajian data kepegawaian	Persentase penyempurnaan data base administrasi kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah PNS yang naik pangkat ( 0 )}}{\text{Jumlah keseluruhan surat masuk dan keluar}} \times 100$	- D U K ( Daftar Urut Kepangkatan )
3.	Terpenuhinya bahan laporan pencapaian Sasaran Kerja Pegawai	Persentase laporan pencapaian Sasaran Kerja Pegawai	$\frac{\text{Jumlah laporan pencapaian SKP ( 26 )}}{\text{Jumlah seluruh pegawai Kesbangpol ( 26 )}} \times 100$	- SKP PNS

#### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
2. Uraian Tugas : a. Mengumpul dan mengolah data, bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi pembinaan teknis perencanaan dan menyusun rencana program dan kegiatan, pendataan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.  
b. Menyusun laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan badan;  
c. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI PERHITUNGAN / PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Terselesaikannya dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Jumlah Laporan Kinerja OPD dan Laporan Tahunan	Jumlah laporan yang disusun sesuai ketentuan	Bidang-Bidang di Lingkungan Badan Kesbangpol

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan
2. Tugas : Membantu penyusunan program, evaluasi dan pelaporan
3. Fungsi : a. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja  
 b. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)  
 c. Membantu menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja (Penja)  
 d. Membantu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  
 e. Membantu melaksanakan proses pengisian SIRUP

SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
Tersedianya bahan analisis perencanaan dan evaluasi kegiatan	Jumlah bahan untuk menyusun matrik rencana strategis (matrik RenStra)	Jumlah bahan penyusunan matrik	Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, DPA)
	Jumlah bahan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	
	Jumlah bahan untuk menyusun Rencana Kerja ( RENJA )	Jumlah bahan penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )	
	Jumlah bahan untuk menyusun Pohon Kinerja	Jumlah bahan penyusunan Pohon Kinerja	
	Jumlah bahan untuk menyusun Cascading Kinerja	Jumlah bahan penyusunan cascading kinerja	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
2. Tugas : Mengelola administrasi keuangan dan membuat laporan keuangan
3. Fungsi : Melakukan penatausahaan keuangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Terselesaikannya dokumen laporan keuangan tepat waktu	Jumlah dan jenis administrasi keuangan yang disiapkan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 21 )}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen ( 21 )}} \times 100$	- DPA - PPTK - Dokumen Keuangan
		Menghimpun Data Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 12 )}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen ( 12 )}} \times 100$	- DPA - Dokumen Keuangan
		Jumlah pengajuan SPP LS Gaji dan tunjangan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 36 )}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen ( 36 )}} \times 100$	- Buku register SPP
		Jumlah laporan SPJ GU/TU tepat waktu Jumlah SPP dan SPM GU yang tepat waktu Jumlah SPP dan SPM/LS yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 48 )}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen ( 48 )}} \times 100$	- SPJ GU/TU - SPP GU - SPM GU - SPP LS - SPM LS
		Jumlah dan jenis bahan laporan keuangan yang disiapkan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 21 )}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen ( 21 )}} \times 100$	- DPA - RFK - Laporan Keuangan tahun sebelumnya

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Bendahara Pengeluaran
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan dokumen keuangan mengenai SPJ, pembayaran gaji dan tunjangan PNS/PTT, SPP-UP, SPP-LA GT, SPP-LS BJ serta perhitungan pajak PPn/PPh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
3. Fungsi : Melakukan Koordinasi mengenai dokumen keuangan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN FORMASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan	Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS/PTT	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 24 )}}{\text{Jumlah Keseluruhan Dokumen ( 24 )}} \times 100$	- DPA - Dokumen keuangan
		Persentase SPJ Pengeluaran perkegiatan, SPJ Belanja Fungsional	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 21 )}}{\text{Jumlah Keseluruhan Dokumen ( 21 )}} \times 100$	- DPA - Dokumen keuangan
		Persentasi perhitungan Pajak PPn/PPh atas beban belanja/Pegeluaran	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 21 )}}{\text{Jumlah Keseluruhan Dokumen ( 21 )}} \times 100$	- DPA - Dokumen keuangan
		Persentase SPP-UP/GU, SPP-LA GT, SPP-LS BJ	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 21 )}}{\text{Jumlah Keseluruhan Dokumen ( 21 )}} \times 100$	- DPA - Dokumen keuangan
		Persentasi Laporan Keuangan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 21 )}}{\text{Jumlah Keseluruhan Dokumen ( 21 )}} \times 100$	- DPA - PPTK - Dokumen keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
2. Tugas : Mengelola administrasi keuangan dan membuat laporan
3. Fungsi : Melakukan penatausahaan keuangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1	Terlaksananya Administrasi Keuangan	Verifikasi Kelengkapan SPJ	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 21 )}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen ( 21 )}} \times 100$	- DPA - PPTK - Dokumen Keuangan
		Menghimpun Data Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 12 )}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen ( 12 )}} \times 100$	- Dokumen Keuangan
		Meneliti Kelengkapan SPP-UP/GU/TU dan SPP LS serta Gaji dan Tunjangan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 36 )}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen ( 36 )}} \times 100$	- Bendahara Pengeluaran - Dokumen Keuangan
		Mencatat Buku Register Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU/LS	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 48 )}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen ( 48 )}} \times 100$	- Bendahara Pengeluaran - Dokumen Keuangan
		Melakukan Penyetoran Pajak – Pajak dari Pembayaran yang dilakukan	$\frac{\text{Jumlah Dokumen ( 21 )}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen ( 21 )}} \times 100$	- Bendahara Pengeluaran - Dokumen Keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan prasarana
2. Tugas : Mengelola dan mengurus barang milik OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
3. Fungsi : Mengelola persediaan barang dan aset milik OPD

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Terlaksananya administrasi sarana dan prasarana	Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah	$\frac{\text{Jumlah Dokumen}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen}} \times 100$	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
		Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang	$\frac{\text{Jumlah Dokumen}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen}} \times 100$	
		Menyiapkan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang	$\frac{\text{Jumlah Dokumen}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen}} \times 100$	
		Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang	$\frac{\text{Jumlah Dokumen}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen}} \times 100$	
		Memberi label barang milik daerah	$\frac{\text{Jumlah Dokumen}}{\text{Jumlah keseluruhan Dokumen}} \times 100$	

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU**

- a. Jabatan : KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN, KETAHANAN SENI BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN
- b. Tugas : Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
- c. Fungsi :
  - a. Pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kerja di bidang wawasan kebangsaan;
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan;
  - c. Pelaksanaan perencanaan, penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan;
  - d. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sosialisasi di bidang wawasan kebangsaan;
  - e. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan dan aplikasi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/ FORMULASI HITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Sinergitas dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama	Persentase kerukunan agama yang telah dipantau	Persentase agama yang telah dipantau dibagi jumlah agama yang ada X 100	Kepala Bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan
		Terlaksananya koordinasi lintas agama	Persentase jumlah tokoh agama dibagi jumlah tokoh yang ada di kab. Natuna X 100	Kepala Bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan
2.	Meningkatnya cakupan pembinaan masyarakat dan generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan dan rasa patriotisme	Cakupan wilayah pembinaan	Jumlah kecamatan yang dibina dibagi jumlah kecamatan keseluruhan X 100	Kepala Bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan
		Meningkatnya pemahaman masyarakat / generasi muda tentang rasa nasionalisme	Jumlah masyarakat / generasi muda yang lulus dibagi jumlah peserta yang dibina X 100	Kepala Bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan
3.	Terjalinnnya harmonisasi antar suku dan golongan	Persentase pembinaan suku dan golongan	Persentase suku yang dibina dibagi jumlah suku yang ada di Kab. Natuna X 100	Kepala Bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2. Tugas : Melaksanakan fasilitasi, menghimpun dan mengolah data serta mengembangkan teknis pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan
3. Fungsi :
  - a. Melaksanakan fasilitasi dalam upaya peningkatan kualitas dan pemahaman nilai ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - b. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - c. Melaksanakan peningkatan forum pembauran bangsa dalam kelompok pelaksana pembauran lapangan (KPPL), tenaga pelaksana pembauran (TPP) RT/RW, Pokja Inter Instansi Pembauran
  - d. Mengumpulkan dan mengolah data dan petunjuk teknis pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di Sub. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/ FORMULASI HITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terlaksananya sosialisasi wawasan kebangsaan	Tersosialisasinya wawasan kebangsaan	Jumlah peserta yang hadir dibagi jumlah peserta sosialisasi X 100	
2.	Meningkatnya kapasitas kader bela negara	Persentase kader bela negara yang aktif	Jumlah kader bela negara yang aktif dibagi jumlah kader bela negara Kab. Natuna X 100	
3.	Terjalinnnya kerukunan antar suku dan golongan	Terlaksananya rapat pembauran kebangsaan	Jumlah rapat pembauran kebangsaan	

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
2. Tugas : Melaksanakan fasilitasi dan menghimpun, menyusun dan mengolah data serta kegiatan teknis ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan.
3. Fungsi : Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/ FORMULASI HITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya data - data aliran keagamaan, aliran kepercayaan, rumah ibadah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda	Tersedianyan data aliran keagamaan	Jumlah aliran keagamaan yang terdata dibagi jumlah aliran keagamaan yang ada X 100	
2.	Terjalannya kerukunan umat beragama	Terlaksananya rapat FKUB	Jumlah rapat FKUB	

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Budaya Politik
2. Tugas : Melaksanakan tugas bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu / pemilu kepala daerah, pemantauan situasi politik serta fasilitasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
3. Fungsi : Menyusun program kerja operasional, bahan rumusan kebijakan, sasaran pelaksanaan tugas, melaksanakan koordinasi/kerjasama/kemitraan dengan instansi/lembaga, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan budaya politik.

NO	SASARAN	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas Ormas	Terwujudnya manajemen Ormas yang baik	<p>Persentase pelayanan fasilitasi penerbitan SKT  <math>\frac{\text{Jumlah SKT yang disahkan}}{\text{Jumlah permohonan SKT Ormas}} \times 100\%</math></p> <p>Persentase pelayanan surat keterangan keberadaan ormas  <math>\frac{\text{Jumlah SKT yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan yang masuk}} \times 100\%</math></p> <p>Persentase peningkatan kapasitas ormas  <math>\frac{\text{Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jml Ormas terdaftar}} \times 100\%</math></p> <p>Persentase pengawasan Ormas yang telah dilakukan  <math>\frac{\text{Jumlah Ormas telah dilakukan pengawasan}}{\text{Jumlah Organisasi Kemasyarakatan}} \times 100\%</math></p> <p>Persentase tertib administrasi ormas  <math>\frac{\text{Jumlah ormas yang memiliki SKT}}{\text{Jumlah ormas di Kab. Natuna}} \times 100\%</math></p>	<p>- Data Ormas terdaftar                      - Data permohonan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>-Data surat keterangan keberadaan                      -Data permohonan ormas melapor/keberadaan</p> <p>- Data kegiatan pembinaan dan pelatihan Ormas                      - Data Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>- Data Ormas                      - Data kegiatan pengawasan Ormas</p> <p>- Data ormas di kabupaten Natuna                      - Data Ormas yang terdaftar + melapor</p>

2	Meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilu	Terciptanya perkembangan demokratisasi dan partisipasi	<p>Persentase partisipasi masyarakat pada Pileg  <math>\frac{\text{Jumlah suara sah}}{\text{jumlah Masyarakat yang memiliki hak pilih}} \times 100\%</math></p> <p>Persentase partisipasi masyarakat pada Pilkada  <math>\frac{\text{Jumlah suara sah}}{\text{jumlah Masyarakat yang memiliki hak pilih}} \times 100\%</math></p> <p>Persentase partisipasi masyarakat pada Pilpres  <math>\frac{\text{Jumlah suara sah}}{\text{jumlah Masyarakat yang memiliki hak pilih}} \times 100\%</math></p> <p>Persentase masyarakat yang mengikuti pelatihan politik  <math>\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan}}{\text{jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih}} \times 100\%</math></p>	<p>- Data KPU</p> <p>- data penduduk yang memiliki hak pilih</p> <p>- Data kegiatan pelatihan</p>
3	Meningkatnya tertib administrasi dalam penyampaian laporan	Terselenggaranya fasilitasi dan verifikasi bantuan keuangan parpol	<p>Persentase penyaluran bantuan keuangan parpol :  <math>\frac{\text{Jumlah permohonan bantuan keuangan parpol}}{\text{Jumlah partai politik yang memiliki kursi di DPRD}} \times 100\%</math></p> <p>Persentase penyampaian LPJ bantuan keuangan Parpol  <math>\frac{\text{Jumlah parpol yang menyampaikan LPJ}}{\text{Jumlah parpol yang menerima bantuan}} \times 100\%</math></p>	<p>- Data perolehan suara Parpol (KPU)</p> <p>- Data anggota DPRD terpilih (KPU)</p> <p>- Data Parpol</p> <p>- Data LPJ Parpol</p>

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat
2. Tugas : Melaksanakan tugas fasilitasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
3. Fungsi : a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pengembangan di bidang Ormas, OKP, Yayasan, LSM dan PTN/PTS  
b. Melaksanakan pendataan, pengolahan data dan identifikasi keberadaan, jumlah dan kegiatan Ormas, OKP, Yayasan LSM dan PTN/PTS.

NO	SASARAN	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas Ormas	Terwujudnya manajemen Ormas yang baik	<p>Persentase pelayanan fasilitasi penerbitan SKT  <math display="block">\frac{\text{Jumlah SKT yang disahkan}}{\text{Jumlah permohonan SKT Ormas}} \times 100\%</math></p> <p>Persentase pelayanan surat keterangan keberadaan ormas  <math display="block">\frac{\text{Jumlah SKT yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan yang masuk}} \times 100\%</math></p> <p>Persentase peningkatan kapasitas ormas  <math display="block">\frac{\text{Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jml Ormas terdaftar}} \times 100\%</math></p> <p>Persentase pengawasan Ormas yang telah dilakukan  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Ormas telah dilakukan pengawasan}}{\text{Jumlah Organisasi Masyarakat}} \times 100\%</math></p> <p>Persentase tertib administrasi ormas  <math display="block">\frac{\text{Jumlah ormas yang memiliki SKT}}{\text{Jumlah ormas di Kab. Natuna}} \times 100\%</math></p>	<p>- Data Ormas terdaftar                      - Data permohonan Organisasi Masyarakat</p> <p>-Data surat keterangan keberadaan                      -Data permohonan ormas melapor/keberadaan</p> <p>- Data kegiatan pembinaan dan pelatihan Ormas                      - Data Organisasi Masyarakat</p> <p>- Data Ormas                      - Data kegiatan pengawasan Ormas</p> <p>- Data ormas di kabupaten Natuna                      - Data Ormas yang terdaftar + melapor</p>

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Politik
2. Tugas : Melaksanakan fasilitasi dalam rangka pengembangan sistem politik serta pelaksanaan kerjasama dalam hubungan dengan partai politik
3. Fungsi : Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pengembangan di bidang partai politik.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN FORMASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
5.	Terpenuhinya pelayanan surat menyurat	1. Peresentase Jumlah Surat yang terkirim/terdistribusi Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Surat yang terdistribusi}}{\text{Jumlah Surat Keluar dan Masuk}} \times 100$	- DPA - Agenda Surat Masuk
2.	Terwujudnya Data Hasil Pemilu	2. Peresentase Jumlah Partisipasi Masyarakat terhadap pemilu ( Pileg, Pilkada, Presiden dan Wakil Presiden)	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Masyarakat/DPT}}{\text{Jumlah suara sah}} \times 100$	- Rapat pleno KPU - BA. Penetapan Jumlah Suara Hasil Pemilu
3.	Terlaksananya Verifikasi Proposal Bantuan Keuangan Parpol	3. Peresentase Jumlah Pengajuan Proposal Bantuan Keuangan Partai Politik	$\frac{\text{Jmlh Prop. Banpol yang di Verfikasi}}{\text{Jumlah Proposal yang masuk}} \times 100$	- Dokumen Proposal Bantuan Keuangan Parpol
4.	Terwujudnya data pendukung LPJ Bantuan Keuangan Parpol	4. Peresentase Jumlah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik ke Bankesbangpolda Kabupaten Natuna.	$\frac{\text{Jumlah LPJ Bantuan Keungan Parpol}}{\text{Jumlah LPJ yang masuk}} \times 100$	- Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Partai Politik
5.	Terpenuhinya Kelengkpan syarat-syarat dokumen Parpol.	5. Peresentase Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Keberadaan Partai Politik Kabupaten Natuna	$\frac{\text{Jumlah surat Keterangan Parpol}}{\text{Jumlah Permohonan yang masuk}} \times 100$	- dokumen/syarat Parti Politik
6.	Terwujudnya kesadaran politik masyarakat	6. Persentase pendidikan Politik Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengikuti}}{\text{Jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih}} \times 100$	- Sosialisasi

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan :Pengadministrasi Umum
2. Tugas : Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat.
3. Fungsi : Melaksanakan pengadministrasian dokumen-dokumen, dan menyiapkan fasilitasi usulan SKT, surat keterangan keberadaan Ormas, serta surat keluar di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

NO	SASARAN	Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Terpenuhinya administrasi surat menyurat sesuai dengan SOP	Persentase pengadministrasian surat menyurat tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah surat yang didokumentasikan}}{\text{Jumlah surat keluar + masuk}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah surat yang didistribusikan}}{\text{Jumlah surat keluar + masuk}}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota Dinas</li> <li>- Telaahan staf</li> <li>- SK</li> <li>- Surat Penugasan</li> <li>- Surat Masuk</li> <li>- Surat Keluar</li> <li>-SKT</li> <li>- Surat keterangan keberadaan</li> </ul>

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanggulangan Bencana
2. Tugas : Merumuskan kebijakan teknis, menyusun rencana kerja, koordinasi dan fasilitasi dalam penanganan konflik, pengawasan orang asing, kewaspadaan dini, inteltrantib Dan penanggulangan bencana serta revitalisasi;
3. Fungsi : Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang kewaspadaan nasional dan penanggulangan bencana.  
Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanggulangan Bencana agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/ FORMULASI HITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Sinergitas dalam penanganan konflik sosial	Koordinasi penanganan konflik sosial	Jumlah koordinasi penanganan konflik sosial	
2.	Meningkatnya cakupan pembinaan generasi muda terhadap kasus penyalahgunaan narkoba	Cakupan wilayah pembinaan	Jumlah kecamatan yang dibina dibagi jumlah kecamatan keseluruhan X 100	

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan kajian strategis, perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyiapan kajian strategis, perumusan kebijakan dan fasilitasi Pelaksanaan kegiatan dibidang kewaspadaan dini dan inteltrantib.
3. Fungsi : a. Membangun jaringan komunikasi dengan segenap lapisan masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini dan antisipasi konflik  
b. Melaksanakan fasilitasi dalam rangka meningkatkan kewaspadaan daerah bagi segenap lapisan masyarakat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN/ FORMULASI HITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terselenggaranya koordinasi kewaspadaan dini pemerintah daerah	Tersedianya laporan koordinasi pelaksanaan antisipasi ATHG	Jumlah laporan ATHG	Laporan dari Tim Wasdin Pemerintah Daerah
2.	Terlaksananya sosialisasi penyalahgunaan narkoba	Tersosialisasinya penyalahgunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	DPA

